

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1 No. 2*
- Amin, I. D. (2013). Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.3 No.1.*
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Kabupaten Bangka Tengah dalam Angka 2018.
- Dien, A. N., Tinangun, J., & Waalandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA. Vol. 3 No.1.*
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gousario, F., & Dharmastuti, C. F. (2015). Regional Financial Performance And Human Development Index Based On Study In 20 Counties/Cities of Level 1 Region. *Journal The Winners Vol. 16 No. 2.*
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariansyah, I. (2011). *Analisis Komparasi Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Di Era Otonomi Daerah*. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kepmendagri No. 690.900 327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Korompot, R., & Warongan, J. (2017). Analysis Of Financial Performance In The Government Of Nourth Sulawesi. *Jurnal Accountability Vol. 06 No. 02.*

- Kusumadewi, W. N., & Ilat, V. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1*.
- Latuny, E. M. (2016). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat). *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi Vol. 10 No.1*.
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 14 No. 2*.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Martono, N. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik Vol. 1 No. 1*.
- Natalia, L., & Astuti, T. D. (2015). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 6 No.1*.
- Noviyanti, Y. (2016). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung.
- Nufus, K., Supratika, H., & Muchtar, A. (2017). Analysis Of Financial Performance Of Local Government Through South Tangerang Calculation Of Realization Regional Budget. *Eropean Journal Of Business And Management Vol. 9 No. 3*.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomus Vol. 4 No. 1*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti Vol.7 No.13*.
- Pratama, R. (2018, Oktober Senin). Berhasil Pertahankan WTP, Ibnu Sebut Ini Indikator Sejahteraan Rakyat. *Bangka Pos*.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No.1*.
- Rahmita. (2018). *Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016*. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Bangka Belitung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- Widjaja, H. (2013). *Peyelenggaraan Otonomi Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.